



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mempawah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Mempawah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
8. Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat Eselon yang memimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
10. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
11. Pejabat Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas tertentu dalam jabatan negeri.

12. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Mempawah berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja atau tenaga yang membantu tugas-tugas pemerintah daerah dengan Surat Penunjukan dari pejabat pembina kepegawaian, dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan khusus;
13. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
14. Non Pegawai adalah isteri Bupati, isteri Wakil Bupati, dan isteri Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
15. Pejabat berwenang memerintahkan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pejabat yang diberikan kewenangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah.
16. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Mempawah, perjalanan ke luar daerah dalam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat, dan di luar Provinsi Kalimantan Barat di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perjalanan dinas ke luar negeri untuk kepentingan negara dan rakyat atas perintah pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas sebagai perintah penugasan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang yang berisi informasi mengenai, nama yang melaksanakan perjalanan dinas, maksud perjalanan dinas, tujuan dan jumlah hari, dan pembebanan anggaran perjalanan dinas.
19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu karena belum ada jabatan definitif pada jabatan tersebut.
20. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapatkan pelimpahan kewenangan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
21. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya maksimal yang menjadi dasar bagi bendaharawan dalam mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
22. Lumpsum adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil atau sistem *at cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Daftar Tambahan biaya riil adalah rincian tambahan biaya yang dikeluarkan sepanjang tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

25. Uang harian adalah uang makan, uang saku dan transport setempat perjalanan dinas.
26. Uang transportasi adalah biaya transportasi darat, laut, udara, dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka menuju tempat penugasan.
27. Uang refresentasi adalah uang tambahan yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Mempawah, sepanjang memenuhi azas kepatutan berdasarkan pertimbangan penugasan.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan anggaran pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas merupakan perjalanan dalam menjalankan tugas kedinasan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. perjalanan dinas luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Perjalanan Dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Indonesia, mulai dari Kabupaten Mempawah ke negara tempat tujuan di luar negeri yang prosedurnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGKATEGORIAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Pengkategorian biaya perjalanan dinas dibagi ke dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
- b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II;
- c. Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, PNS Golongan IV;
- d. PNS Golongan III, PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap/Non PNS;

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan selektif memenuhi azas kepatutan dan kewajiban dengan berdasarkan pertimbangan obyektif dari Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan SPT dan SPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dapat diterbitkan untuk satu atau beberapa orang personil, sedangkan SPD berlaku untuk satu orang personil.
- (4) SPT dan SPD diterbitkan pada hari kerja, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian standar biaya perjalanan dinas dapat diberikan sesuai dengan tingkat eselon yang dilimpahkan kepadanya.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Tenaga kontrak, Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Lamanya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Perjalanan Dinas luar Daerah diatur berdasarkan azas kepatutan dan kewajiban dengan ketentuan :
 - a. Perjalanan Dinas ke Luar Daerah dalam provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 1 (satu) hari.
 - b. Perjalanan dinas ke luar Daerah luar provinsi dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan konsultasi tidak melebihi dari 3 (tiga) hari, termasuk tanggal berangkat dan tanggal kembali;
 - c. Perjalanan dinas dalam Daerah ke Kecamatan atau ke Desa dalam wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau tugas sejenisnya tidak lebih dari 1 (satu) hari.

- (3) Pengecualian dari ketentuan ayat (2) meliputi kegiatan penelitian, pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, survey, pemungutan pajak daerah, uji tera, pelayanan khusus kepada masyarakat, mengikuti kursus, bimbingan teknis, *on the job training*, kaji terap dan pelatihan kedinasan lainnya dan dibuktikan dengan bukti yang sah.
- (4) Penugasan yang bersifat koordinasi dan konsultasi yang melebihi ketentuan hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c sepanjang dapat dibuktikan dengan dasar yang sah, dapat ditambah hari perjalanan dinas.
- (5) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan seperti surat, faximile dan/atau sejenisnya.

Pasal 6

- (1) Khusus untuk Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran (kontribusi) meliputi akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan diberikan biaya transportasi penuh dan uang harian maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya tidak terdapat uang setoran (kontribusi) yang didalamnya tidak mencakup akomodasi dan transportasi, maka kepada yang bersangkutan dapat menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Apabila pelaksanaan pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, maka mengacu pada standar biaya khusus yang berlaku.
- (4) Dalam hal tugas-tugas khusus penanggulangan bencana, dan penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan pegawai negeri sipil dapat diberikan perjalanan dinas pada hari libur dengan Surat Penugasan Bupati atau pejabat yang berwenang.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Pejabat berwenang memberi perintah untuk melakukan perjalanan dinas adalah Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala UPT.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menetapkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas.

- (3) Dalam menerbitkan SPT harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Bupati dan Wakil Bupati :
Bupati dan Wakil Bupati SPT ditandatangani oleh Bupati dan dalam hal Bupati berhalangan SPT Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati, SPD dan lembar visum perjalanan dinas Bupati ditandatangani oleh Bupati sedangkan SPD dan lembar visum perjalanan dinas Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD, dan dalam hal Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhalangan SPT Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan atas nama Ketua DPRD, sedangkan SPD dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran.
 - c. Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah:
 - 1) Sekretaris Daerah, SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah ke luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 3) Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi sesuai kewenangannya;
 - 4) Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Non PNS atas perintah dan nota disposisi Bupati dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 5) Pejabat Fungsional Umum/Staf, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/Pegawai Kontrak dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan dalam daerah SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi sesuai kewenangannya;
 - 6) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

- d. Pegawai di luar Lingkungan Sekretariat Daerah :
- 1) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas/Badan;
 - 3) Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Non PNS atas perintah dan nota disposisi Bupati dapat melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 4) Pejabat Fungsional Khusus, Pejabat Fungsional Umum/Staf dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/ Pegawai Kontrak yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah dan ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Bupati dan dalam hal Kepala Perangkat Daerah berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Badan/Dinas;
 - 5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- e. Pegawai di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.
- 1) Camat, Lurah, serta Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di luar Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - 2) Camat, Lurah, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi Kalimantan Barat dan Perjalanan Dinas dalam daerah SPT ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati;
 - 3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran.
- f. Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah di dalam Provinsi Kalimantan Barat SPT ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dan dalam hal Kepala Satuan Kerja berhalangan SPT ditandatangani oleh Sekretaris Dinas;

- 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Staf yang melaksanakan perjalanan dinas ke dalam daerah SPT ditandatangani oleh Kepala UPT atas nama Kepala Satuan Kerja;
- 3) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai Auditor atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang melaksanakan pemeriksaan/pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada perangkat Daerah SPT ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten atas nama Bupati.
- (2) Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan lembar visum perjalanan dinas ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 9

Pejabat berwenang yang memberi perintah perjalanan dinas harus memperhatikan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan perjalanan dinas di lingkungan instansi/satuan kerja yang bersangkutan.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dihitung sesuai dengan lamanya penugasan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jarak minimal 8 Km dan lamanya penugasan minimal 8 jam.
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan berwenang untuk menilai kesesuaian, kepatutan, dan kewajaran atas biaya-biaya perjalanan dinas dan tambahan biaya-biaya riil perjalanan dinas.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya masing-masing jenisnya, terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19
 - f. Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD; dan
 - g. biaya menjemput mengantar jenazah.
- (5) Khusus biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan dapat ditambah biaya kontribusi.

- (6) Besarnya biaya perjalanan dinas dalam Daerah dan perjalanan dinas luar Daerah sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Uang harian sebagaimana dimaksud Pasal 10 pada ayat (4) huruf a, sudah termasuk uang saku dan uang makan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, terdiri dari biaya transportasi lokal yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi utama.
- (2) Biaya transportasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil dan/atau *at cost* meliputi tiket pesawat dan/atau moda transportasi lain, biaya airport tax dan retribusi bandara.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas juga dapat diberikan tambahan biaya transportasi untuk tempat tujuan yang tidak memiliki moda transportasi umum.
- (4) Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya kebutuhan transport dengan membuat rincian pengeluaran dalam daftar tambahan biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (4) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tidak termasuk biaya tambahan seperti minibar, *laundry*, dan *service cost* yang disediakan pihak hotel/penginapan.
- (2) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar daerah keluar provinsi dibayarkan maksimal 2 (dua) malam, keluar daerah dalam provinsi maksimal 1 (satu) malam dengan memperhatikan azas kepatutan, sepanjang tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (2) jika terdapat dasar pelaksanaan kegiatan yang sah dari penyelenggara kegiatan, maka dapat ditambah biaya penginapan.
- (4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan maksimal sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari standar biaya penginapan kota tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (5) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk biaya penginapan perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu bersamaan pada kegiatan tertentu kecuali dengan alasan gender.
- (6) Ketentuan penggunaan biaya penginapan, sebagai berikut :
- a. Penginapan bagi Bupati/Wakil Bupati, Unsur Pimpinan DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat menggunakan *premium/executive room* untuk 1 (satu) orang.
 - b. Penginapan bagi Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pejabat Eselon II sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat menggunakan *deluxe/superior room* untuk 1 (satu) orang.
 - c. Penginapan bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan PNS Golongan IV sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat menggunakan *standar/deluxe room* untuk 1 (satu) orang.
 - d. Penginapan bagi PNS Golongan II, PNS Golongan I, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Pegawai Tidak Tetap/ Non PNS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, menggunakan *standar/deluxe room* untuk 1 (satu) orang.

Pasal 14

- (1) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d, dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Unsur Pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II sepanjang memenuhi azas kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uang refresentasi dibayarkan sesuai klasifikasi penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e meliputi biaya pemeriksaan *real time polymerase chain reaction* (RT-PCR), *swab test* dan/atau pemeriksaan sejenis lainnya yang diwajibkan pada saat melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*.
- (2) Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil atau *at cost* sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tempat penugasan tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, maka pelaksana perjalanan dinas dapat mengajukan tambahan biaya yang dicantumkan pada tambahan biaya riil perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal khusus, Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah dapat menggunakan kendaraan sewa.
- (3) Biaya kendaraan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dan jasa pengemudi yang berpedoman ada standar biaya umum yang berlaku.
- (4) Tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan mengikuti standar perjalanan dinas sebagai di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

Pasal 18

- (1) Keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah pejabat negara/aparatur sipil negara yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, diberikan biaya angkutan jenazah yang terdiri dari biaya pemetian dan biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengurusan dan pengangkutan jenazah dapat diberikan paling banyak untuk 5 (lima) personil, termasuk keluarga yang meninggal.
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam rangka pengurusan jenazah dapat diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (5) Penganggaran keperluan penjemputan dan/atau mengantar jenazah pejabat negara/aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Sistem pembayaran biaya perjalanan dinas terdiri dari pembayaran dengan sistem *lumpsum* dan pembayaran dengan sistem *riil* atau sistem *ad cost*.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan melalui mekanisme UP atau LS.

Pasal 20

- (1) Pembayaran perjalanan dinas dengan mekanisme langsung (LS) dapat dilakukan melalui Perikatan dengan penyedia jasa;
- (2) Perjalanan dinas jabatan yang dilakukan melalui perikatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, dan
 - b. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuti study banding, kaji terap, seminar, dan sejenisnya.

Pasal 21

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas dapat berupa *event organization*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi, dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memiliki sertifikat dan/atau izin operasional dari instansi yang berwenang.

BAB VII PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Legalisasi SPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan dibubuhi stempel instansi atau tempat yang dituju.
- (2) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Register atau penomoran SPT dan SPD disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perjalanan dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada hari kerja dan tidak dibenarkan penomoran ganda atau penomoran mundur.
- (4) Penerbitan SPT dan SPD dapat dilakukan pada hari libur untuk tugas-tugas yang mendesak, seperti dalam hal penanganan bencana daerah dan kegiatan lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pertanggungjawaban perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja (P3K), Non PNS yang telah melaksanakan perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan keuangan yang telah dibayarkan dan digunakan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, dengan melampirkan bukti-bukti perjalanan dinas;
 - b. Bukti-bukti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a harus asli dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bagi yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban pada waktunya sebagaimana dimaksud huruf a, maka kepada yang bersangkutan tidak dapat diberikan perjalanan dinas berikutnya;
 - d. Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar daerah, pelaksana perjalanan dinas melampirkan tiket pesawat, boarding pass, airport tax atau tiket moda transportasi lainnya, bukti pembayaran penginapan, bukti pembayaran sewa kendaraan sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.
- (3) Dalam hal kelengkapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh, kepada pelaksana perjalanan dinas membuat daftar biaya tambahan riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dapat dibayarkan uang harian.
- (2) Perjalanan dinas pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tugas pengawasan ujian nasional dan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (3) Perjalanan dinas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan tugas pengawasan atau kegiatan sejenisnya dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dapat diberikan uang harian.
- (4) Supir dan ajudan pejabat Negara yang mengikuti kegiatan atau antar/jemput pejabat Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dapat diberikan uang harian
- (5) Pembayaran uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) melampirkan Surat Perintah Tugas dan Daftar Rincian Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Apabila Supir, ajudan pejabat Negara yang mengikuti kegiatan atau melaksanakan antar jemput pejabat Negara menginap, maka dapat juga diberikan biaya penginapan.
- (2) Biaya penginapan bagi ajudan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak tersedia kamar penginapan dan/atau tarif penginapan melebihi standar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (6) huruf d, dapat menggunakan kamar tersedia dengan tarif terendah pada Hotel di mana Pejabat Negara atau Pejabat Daerah menginap.
- (3) Khusus biaya transportasi berupa tiket pesawat bagi ajudan dan pendamping pejabat Negara/pejabat Daerah apabila harga tiket melebihi standar yang ditetapkan dapat menggunakan tiket yang tersedia pada pesawat yang digunakan oleh pejabat Negara/Pejabat Daerah.

Pasal 26

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh lebih dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam dibayarkan uang harian dan transport.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke kelurahan/desa dalam satu Kecamatan dengan jarak tempuh kurang dari 8 Km dengan penugasan minimal 8 jam hanya dapat dibayarkan uang harian.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas jabatan ke desa/dusun karena kesulitan transportasi dan diharuskan menggunakan moda transportasi setempat di luar standar transportasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat mengajukan tambahan biaya transport perjalanan dinas sesuai dengan tingkat kewajaran harga setempat.
- (4) Pengajuan tambahan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan daftar tambahan biaya riil perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka memenuhi azas kepatutan dan kewajaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepatutan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dan jumlah personil yang melaksanakan perjalan dinas sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi bagi ASN hanya dapat diberikan kepada pejabat yang menduduki eselonering dan/atau tenaga fungsional tertentu serta dapat didampingi 1 (satu) orang staf pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- b. Pendamping terhadap kegiatan dan monitoring pelaksanaan kegiatan pelatihan kedinasan hanya dapat diberikan maksimal 3 (tiga) orang;
- c. Pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta 10 sampai 30 orang hanya dapat diberikan maksimal 3 (tiga) orang.
- d. Pendamping terhadap kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan/atau sejenisnya dengan jumlah peserta lebih dari 30 orang hanya dapat diberikan maksimal 4 (empat) orang.

Pasal 28

Bagi kegiatan DAK non fisik atau kegiatan lainnya yang standar perjalanan diatur tersendiri dengan petunjuk teknis kementerian masing-masing, perjalanan dinas mengikuti petunjuk dimaksud dan bagi yang tidak di atur tetap mengacu pada Peraturan ini.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, menyelenggarakan pengendalian internal dan pengawasan atas kewajaran dan kepatutan penggunaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dan pejabat yang berkaitan bertanggungjawab atas kerugian Negara/Daerah tersebut.
- (3) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Dalam rangka mendukung kegiatan Pejabat Negara ke luar negeri, dapat menyediakan pendamping yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dibebankan pada pos perjalanan dinas Bupati selaku Pejabat Negara.
- (3) Satuan Biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA PERJALANAN
DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

Contoh-contoh Format Perjalanan Dinas :

1. Contoh Format SPT Bupati/Wakil Bupati

(lambang Garuda Hitam)

KOP NASKAH DINAS BUPATI

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / Umum

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : 1. **MENUGASKAN :**
Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dilampirkan keluaran di
Mempawah
Pada Tanggal :

BUPATI MEMPAWAH

Ttd/cap

Nama Jelas

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

2. Contoh Format SPT Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD

(lambang Daerah hitam)

KOP NASKAH DINAS DPRD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 / / Set-DPRD

Dasar : 1.
2.
3.

Kepada : 1. **MENUGASKAN :**
Nama :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

KETUA DPRD

dt/cap

Nama Jelas

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

3. Contoh Format SPT di lingkungan Sekretariat Daerah

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 /...../

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Sekretaris Daerah
ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

4. Contoh Format SPT PNS pada Perangkat Daerah.

(Lambang Daerah)

KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 094 /...../

Dasar : 1.
2.
3.

MENUGASKAN :

Kepada : 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
2. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk : 1.
2.
3.

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala Perangkat Daerah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

Tembusan :

1.
2.
3. Dstnya

5. Contoh Format SPD untuk Bupati/Wakil Bupati/DPRD :

(lambang KabupatenF Mempawah)
KOP NASKAH SEKRETARIAT DAERAH

=====

Nomor : 094 / /Umum
 Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

| | | | |
|-----|---|---|----------------------------------|
| 1. | Pejabat yang memberi perintah | : | Bupati/Ketua DPRD |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas | : | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | : | a. |
| | b. Jabatan | : | b. |
| | c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas | : | c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | : | |
| 5. | Alat Angkut yang dipergunakan | : | |
| 6. | a. Tempat Berangkat | : | a. |
| | b. Tempat Tujuan | : | b. |
| 7. | a. Perjalanan Dinas direncanakan | : | |
| | b. Tanggal berangkat | : | |
| | c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | : | |
| 8. | Pengikut | : | Tanggal lahir Keterangan |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. Dstnya | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | |
| | a. Instansi | : | a. |
| | b. Mata Anggaran | : | b. |
| 10. | Keterangan Lain-lain | : | Misalnya undangan dan lain-lain. |

Dikeluarkan di Mempawah
 Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
 Sekretaris Daerah/Sekretaris
 Dewan

ttd/cap

Nama Lengkap

6. Contoh Format SPD dilingkungan Perangkat Daerah.

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SETDA/SKPD

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------------------|------------|
| 1. | Pejabat yang memberi perintah | : | Kepala Perangkat Daerah | |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas | : | | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | : | a. | |
| | b. Jabatan | : | b. | |
| | c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas | : | c. | |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | : | | |
| 5. | Alat Angkut yang dipergunakan | : | | |
| 6. | a. Tempat Berangkat | : | a. | |
| | b. Tempat Tujuan | : | b. | |
| 7. | a. Perjalanan Dinas direncanakan | : | | |
| | b. Tanggal berangkat | : | | |
| | c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | : | | |
| 8. | Pengikut | : | Tanggal lahir | Keterangan |
| | 1. | | | |
| | 2. | | | |
| | 3. Dstnya | | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | | |
| | a. Instansi | : | a. | |
| | b. Mata Anggaran | : | b. | |
| 10. | Keterangan Lain-lain | : | (misalnya surat pemberitahuan, dll) | |

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Kepala Perangkat Daerah
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

7. Contoh Format SPD untuk Kecamatan

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS KECAMATAN

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Pejabat yang memberi perintah | : | Camat |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas | : | |
| 3. | a. Pangkat dan Golongan | : | a. |
| | b. Jabatan | : | b. |
| | c. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas | : | c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | : | |
| 5. | Alat Angkut yang dipergunakan | : | |
| 6. | a. Tempat Berangkat | : | a. |
| | b. Tempat Tujuan | : | b. |
| 7. | a. Perjalanan Dinas direncanakan | : | |
| | b. Tanggal berangkat | : | |
| | c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | : | |
| 8. | Pengikut | : | Tanggal lahir Keterangan |
| | 1. | | |
| | 2. | | |
| | 3. Dstnya | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | |
| | c. Instansi | : | a. |
| | d. Mata Anggaran | : | b. |
| 10. | Keterangan Lain-lain | : | SPT. Nomor 094/...../ Tanggal |

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. BUPATI MEMPAWAH
Camat
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

8. Contoh Format SPD untuk UPTD

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS UPTD

=====

Nomor : 094 / /SKPD
Lembar ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Pejabat yang memberi perintah | : | Kepala UPTD |
| 2. | Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan tugas | : | |
| 3. | d. Pangkat dan Golongan | : | a. |
| | e. Jabatan | : | b. |
| | f. Tingkat Menurut Perjalanan Dinas | : | c. |
| 4. | Maksud Perjalanan Dinas | : | |
| 5. | Alat Angkut yang dipergunakan | : | |
| 6. | c. Tempat Berangkat | : | a. |
| | d. Tempat Tujuan | : | b. |
| 7. | d. Perjalanan Dinas direncanakan | : | |
| | e. Tanggal berangkat | : | |
| | f. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru | : | |
| 8. | Pengikut | : | Tanggal lahir Keterangan |
| | 4. | | |
| | 5. | | |
| | 6. Dstnya | | |
| 9. | Pembebanan Anggaran | | |
| | e. Instansi | : | c. |
| | f. Mata Anggaran | : | d. |
| 10. | Keterangan Lain-lain | : | SPT. Nomor 094/...../ Tanggal |

Dikeluarkan di Mempawah
Pada Tanggal :

a.n. Kepala Perangkat Daerah
Kepala UPTD
Ttd/cap
Nama Lengkap
NIP.

9. Contoh Lembar Belakang SPD dan Pengesahan :

| | |
|---|--|
| SPD Nomor : 094/ / Berangkat Dari : (tempat kedudukan) Pada Tanggal : Ke : | |
| a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah Dtt / Cap. <u>Nama Jelas</u> Pangkat NIP. | |
| II. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : |
| III. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : |
| IV. Tiba di : Pada Tanggal : | Berangkat Dari : Ke : Pada Tanggal : |
| V. Tiba Kembali di : Pada Tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. a.n. BUPATI MEMPAWAH Kepala Perangkat Daerah Ttd / Cap Nama Lengkap Pangkat / NIP | |
| VI. Catatan Lain-lain : | |
| VII. Perhatian : Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, pejabat yang mengesahkan tanggal keberangkatan serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya. | |

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|-----|---|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Biaya <i>Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> | Orang/Kali | Rp. 900.000,- |
| 2. | Biaya <i>Rapid Test/ Swap Test Covid-19</i> | Orang/Kali | Rp. 300.000,- |

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ~~4-1-2021~~
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN ~~2021~~..... NOMOR ~~2~~.....

BUPATI MEMPAWAH
 DEWI INA

10. Contoh : FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

(Lambang Daerah)
KOP NASKAH DINAS SKPD

=====

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada :
Dari :
Tanggal :
Hal :

I. Dasar :

II. Maksud dan Tujuan :

III. Hasil Yang Diperoleh :

Adapun hasil yang diperoleh dalam melaksanakan perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut :

1.
2.
3. Dstnya

IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas inidibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti pertanggungjawaban dalam melaksanakan perjalanan dinas.

Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. (Nama / Nip) :
2. (Nama / Nip) :
3. Dstnya ..

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 4-1-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERI A DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021..... NOMOR 2.....

BUPATI MEMPAWAH

IRKINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

A. FASILITAS PERJALANAN DINAS STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

1. FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

| NO. | GOLONGAN PERJALANAN DINAS | TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN | | |
|-----|---------------------------|---|------------------------------------|------------------|
| | | LUAR DAERAH /KAB LAIN (DALAM PROV KALBAR) | LUAR DAERAH (LUAR PROVINSI KALBAR) | |
| | | | PESAWAT UDARA | BUS / KERETA API |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Tingkat A | Angkutam darat /pesawat udara, dan air | Bisnis | Eksekutif |
| 2. | Tingkat B | | Bisnis | Eksekutif |
| 3. | Tingkat C | | Ekonomi | Bisnis |
| 4. | Tingkat D | | Ekonomi | Bisnis |

2. STANDAR BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

| NO. | URAIAN | NILAI (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|------------------------|-------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | BIAYA PEMETIAN JENAZAH | 25.000.000 | Pengangkutan Jenazah Menurut tarif yang berlaku dan moda transportasi yang digunakan. |
| 2. | PENGANGKUTAN | | |

3. UANG REFRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA/KETUA DAN ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II.

| NO. | URAIAN | TARIF | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | LUAR DAERAH (Rp.) | DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (Rp.) |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | BUPATI/WK. BUPATI DAN PIMPINAN DPRD | 250.000 | 125.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000 | 75.000 |

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

1. KECAMATAN SUNGAI PINYUH

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------------|--|
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | PENGINAPAN | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 110.000,00 | | 385.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 110.000,00 | | 335.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 110.000,00 | | 260.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 110.000,00 | | 260.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |

2. KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 110.000,00 | | 385.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 110.000,00 | | 335.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 110.000,00 | | 260.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 110.000,00 | | 260.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 110.000,00 | | 210.000,00 | | |

3. KECAMATAN ANJONGAN

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 125.000,00 | | 400.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 125.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 125.000,00 | | 275.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 125.000,00 | | 275.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 125.000,00 | | 225.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 125.000,00 | | 225.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 125.000,00 | | 225.000,00 | | |

4. KECAMATAN TOHO

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 150.000,00 | | 425.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | | 375.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |

5. KECAMATAN SADANIANG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 225.000,00 | | 500.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | | 450.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 225.000,00 | | 375.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 225.000,00 | | 375.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 225.000,00 | | 325.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 225.000,00 | | 325.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 225.000,00 | | 325.000,00 | | |

6. KECAMATAN SEGEDONG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | JUMLAH | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 150.000,00 | | 425.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | | 375.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 150.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 150.000,00 | | 250.000,00 | | |

7. KECAMATAN JONGKAT

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | JUMLAH | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | 125.000,00 | 275.000,00 | 200.000,00 | | 475.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | 75.000,00 | 225.000,00 | 200.000,00 | | 425.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 200.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 200.000,00 | | 350.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 200.000,00 | | 300.000,00 | | |

8. KECAMATAN MEMPAWAH HILIR

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | JUMLAH | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |

9. KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PER HARI | | | | | | KETERANGAN | |
|-----|-----------------------------------|---|-------------------|------------|-------------|--|------------|---------------------------|--|
| | | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | TRANSPORTAS | | JUMLAH | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | Dibayarkan secara lumpsum | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 150.000,00 | - | 150.000,00 | - | | 150.000,00 | | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |
| 6. | NON PNS/P3K | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |
| 7. | NON ASN | 100.000,00 | - | 100.000,00 | - | | 100.000,00 | | |

C. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI

1. KOTA PONTIANAK

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 1.510.000 | 300.000 | - | 2.440.000 | Darat | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 1.130.000 | 300.000 | - | 1.960.000 | Darat | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 860.000 | 300.000 | - | 1.540.000 | Darat | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 450.000 | 300.000 | - | 1.130.000 | Darat | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat | |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat | |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat | |

2. KOTA SINGKAWANG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 1.510.000 | 300.000 | - | 2.440.000 | Darat | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 1.130.000 | 300.000 | - | 1.960.000 | Darat | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---|-----------|-------|
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 860.000 | 300.000 | - | 1.540.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 450.000 | 300.000 | - | 1.130.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |

3. KABUPATEN KUBU RAYA

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 1.510.000 | 300.000 | - | 2.440.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 1.130.000 | 300.000 | - | 1.960.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 860.000 | 300.000 | - | 1.540.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 450.000 | 300.000 | - | 1.130.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 360.000 | 300.000 | - | 990.000 | Darat |

4. KABUPATEN SAMBAS

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.400.000 | 400.000 | - | 2.530.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 1.030.000 | 400.000 | - | 2.060.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 650.000 | 400.000 | - | 1.530.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 550.000 | 400.000 | - | 1.430.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |

5. KABUPATEN BENGKAYANG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.400.000 | 400.000 | - | 2.530.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 1.030.000 | 400.000 | - | 2.060.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 650.000 | 400.000 | - | 1.530.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 550.000 | 400.000 | - | 1.430.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.280.000 | Darat |

6. KABUPATEN LANDAK

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 1.400.000 | 400.000 | - | 2.430.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 1.030.000 | 400.000 | - | 1.960.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 650.000 | 400.000 | - | 1.430.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 550.000 | 400.000 | - | 1.330.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.180.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.180.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 450.000 | 400.000 | - | 1.180.000 | Darat |

7. KABUPATEN SANGGAU

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.510.000 | 500.000 | - | 2.740.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 1.130.000 | 500.000 | - | 2.260.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 860.000 | 500.000 | - | 1.840.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 450.000 | 500.000 | - | 1.430.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 500.000 | - | 1.290.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 500.000 | - | 1.290.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 500.000 | - | 1.290.000 | Darat |

8. KABUPATEN SEKADAU

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.100.000 | 750.000 | - | 2.580.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 960.000 | 750.000 | - | 2.340.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 860.000 | 750.000 | - | 2.090.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 550.000 | 750.000 | - | 1.780.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 750.000 | - | 1.540.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 750.000 | - | 1.540.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 750.000 | - | 1.540.000 | Darat |

9. KABUPATEN SINTANG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.100.000 | 800.000 | 3.500.000 | 6.130.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 960.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.890.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 860.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.640.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 550.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.330.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.090.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.090.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | 3.500.000 | 5.090.000 | Darat |

10. KABUPATEN MELAWI

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 1.100.000 | 800.000 | - | 2.630.000 | Darat |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 960.000 | 800.000 | - | 2.390.000 | Darat |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 860.000 | 800.000 | - | 2.140.000 | Darat |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 550.000 | 800.000 | - | 1.830.000 | Darat |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | - | 1.590.000 | Darat |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | - | 1.590.000 | Darat |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 360.000 | 800.000 | - | 1.590.000 | Darat |

11. KABUPATEN KAPUAS HULU

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 530.000 | 250.000 | 780.000 | 1.400.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 6.780.000 | Darat/Udara |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 530.000 | 150.000 | 680.000 | 1.030.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 6.310.000 | Darat/Udara |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 530.000 | - | 530.000 | 900.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 6.030.000 | Darat/Udara |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 530.000 | - | 530.000 | 860.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 5.990.000 | Darat/Udara |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 5.410.000 | Darat/Udara |
| 6. | NON PNS/P3K | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 5.410.000 | Darat/Udara |
| 7. | NON ASN | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 1.100.000 | 3.500.000 | 5.410.000 | Darat/Udara |

12. KABUPATEN KETAPANG

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 530.000 | 250.000 | 780.000 | 1.400.000 | 900.000 | 3.500.000 | 6.580.000 | Darat/Udara |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 530.000 | 150.000 | 680.000 | 1.030.000 | 900.000 | 3.500.000 | 6.110.000 | Darat/Udara |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 530.000 | - | 530.000 | 900.000 | 900.000 | 3.500.000 | 5.830.000 | Darat/Udara |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 530.000 | - | 530.000 | 860.000 | 900.000 | 3.500.000 | 5.790.000 | Darat/Udara |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 900.000 | 3.500.000 | 5.210.000 | Darat/Udara |
| 6. | NON PNS/P3K | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 900.000 | 3.500.000 | 5.210.000 | Darat/Udara |
| 7. | NON ASN | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 900.000 | 3.500.000 | 5.210.000 | Darat/Udara |

13. KABUPATEN KAYONG UTARA

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|---------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) 2) | BIAYA TRANSPORT DARAT | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | TRANSPORT LOKAL | TIKET PESAWAT | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 530.000 | 250.000 | 780.000 | 1.400.000 | 750.000 | 3.500.000 | 6.430.000 | Darat/Udara |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 530.000 | 150.000 | 680.000 | 1.030.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.960.000 | Darat/Udara |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 530.000 | - | 530.000 | 900.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.680.000 | Darat/Udara |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 530.000 | - | 530.000 | 860.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.640.000 | Darat/Udara |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.060.000 | Darat/Udara |
| 6. | NON PNS/P3K | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.060.000 | Darat/Udara |
| 7. | NON ASN | 450.000 | - | 450.000 | 360.000 | 750.000 | 3.500.000 | 5.060.000 | Darat/Udara |

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refrepresentasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya TRANSPORT LOKAL Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dibayarkan secara at Lumpsum.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost dan dan biaya taksi Bandara mengikuti ketentuan standar pada huruf C angka 1
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara Lumpsum.

D. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR PROVINSI

1. PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM (KOTA BANDA ACEH)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | JUMLAH |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 360.000 | 250.000 | 610.000 | 4.420.000 | 350.000 | 11.872.000 | 246.000 | 17.498.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 360.000 | 150.000 | 510.000 | 3.526.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 11.905.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 360.000 | - | 360.000 | 1.294.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 9.523.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 360.000 | - | 360.000 | 556.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 8.785.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 310.000 | - | 310.000 | 556.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 8.735.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 310.000 | - | 310.000 | 556.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 8.735.000 |
| 7. | NON ASN | 310.000 | - | 310.000 | 556.000 | 350.000 | 7.273.000 | 246.000 | 8.735.000 |

2. PROVINSI SUMATERA UTARA (KOTA MEDAN)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | JUMLAH |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.960.000 | 350.000 | 11.872.000 | 464.000 | 18.266.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 1.518.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 10.125.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.100.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 9.557.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 530.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 8.987.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 530.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 8.937.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 530.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 8.937.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 530.000 | 350.000 | 7.273.000 | 464.000 | 8.937.000 |

3. PROVINSI RIAU (KOTA PEKAN BARU)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | JUMLAH |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 3.820.000 | 350.000 | 11.872.000 | 188.000 | 16.850.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 3.119.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 11.450.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.650.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 9.831.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 852.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 9.033.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 852.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 8.983.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 852.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 8.983.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 852.000 | 350.000 | 7.273.000 | 188.000 | 8.983.000 |

4. PROVINSI KEPULAUAN RIAU (KOTA BATAM)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | JUMLAH |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.275.000 | 350.000 | 7.594.000 | 274.000 | 13.113.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 1.854.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 7.394.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.037.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 6.427.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 792.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 6.182.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 792.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 6.132.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 792.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 6.132.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 792.000 | 350.000 | 4.396.000 | 274.000 | 6.132.000 |

5. PROVINSI JAMBI (KOTA JAMBI)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jlh H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | JUMLAH |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.000.000 | 350.000 | 6.878.000 | 294.000 | 12.142.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 3.337.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 8.512.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.212.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 6.237.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 580.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 5.605.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 580.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 5.555.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 580.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 5.555.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 580.000 | 350.000 | 4.011.000 | 294.000 | 5.555.000 |

6. PROVINSI SUMATERA BARAT (KOTA PADANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 5.236.000 | 350.000 | 8.193.000 | 380.000 | 14.789.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 3.332.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 9.052.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.353.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 6.923.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 650.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 6.220.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 650.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 6.170.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 650.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 6.170.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 650.000 | 350.000 | 4.460.000 | 380.000 | 6.170.000 |

7. PROVINSI SUMATERA SELATAN (KOTA PALEMBANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 5.850.000 | 350.000 | 6.685.000 | 256.000 | 13.771.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 3.083.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 8.059.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.571.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 6.397.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 861.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 5.687.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 861.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 5.637.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 861.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 5.637.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 861.000 | 350.000 | 3.840.000 | 256.000 | 5.637.000 |

8. PROVINSI LAMPUNG (KOTA BANDAR LAMPUNG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 4.491.000 | 350.000 | 5.380.000 | 334.000 | 11.185.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 2.067.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 6.501.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.140.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 5.424.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 580.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 4.864.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 580.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 4.814.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 580.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 4.814.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 580.000 | 350.000 | 3.220.000 | 334.000 | 4.814.000 |

9. PROVINSI BENGKULU (KOTA BENGKULU)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 2.071.000 | 350.000 | 8.717.000 | 218.000 | 11.986.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 1.628.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 7.768.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.546.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 7.536.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 630.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 6.620.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 630.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 6.570.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 630.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 6.570.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 630.000 | 350.000 | 5.042.000 | 218.000 | 6.570.000 |

10. PROVINSI BANGKA BELITUNG (KOTA PANGKAL PINANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 410.000 | 250.000 | 660.000 | 3.827.000 | 350.000 | 6.279.000 | 180.000 | 11.296.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 410.000 | 150.000 | 560.000 | 2.838.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 7.661.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 410.000 | - | 410.000 | 1.957.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 6.630.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 410.000 | - | 410.000 | 622.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 5.295.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 360.000 | - | 360.000 | 622.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 5.245.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 360.000 | - | 360.000 | 622.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 5.245.000 |
| 7. | NON ASN | 360.000 | - | 360.000 | 622.000 | 350.000 | 3.733.000 | 180.000 | 5.245.000 |

11. PROVINSI DKI JAKARTA (KOTA JAKARTA)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 530.000 | 250.000 | 780.000 | 5.850.000 | 350.000 | 4.353.000 | 512.000 | 11.845.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 530.000 | 150.000 | 680.000 | 1.490.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 5.813.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 530.000 | - | 530.000 | 992.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 5.165.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 530.000 | - | 530.000 | 730.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 4.903.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 480.000 | - | 480.000 | 730.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 4.853.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 480.000 | - | 480.000 | 730.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 4.853.000 |
| 7. | NON ASN | 480.000 | - | 480.000 | 730.000 | 350.000 | 2.781.000 | 512.000 | 4.853.000 |

12. PROVINSI BANTEN (KOTA SERANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 5.725.000 | 350.000 | 4.353.000 | 892.000 | 11.940.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 2.373.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 6.916.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.000.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 5.393.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 718.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 5.111.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 718.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 5.061.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 718.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 5.061.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 718.000 | 350.000 | 2.781.000 | 892.000 | 5.061.000 |

13. PROVINSI JAWA BARAT (KOTA BANDUNG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 430.000 | 250.000 | 680.000 | 5.381.000 | 350.000 | 6.417.000 | 332.000 | 13.160.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 430.000 | 150.000 | 580.000 | 2.755.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 8.474.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 430.000 | - | 430.000 | 1.006.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 6.575.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 430.000 | - | 430.000 | 570.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 6.139.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 380.000 | - | 380.000 | 570.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 6.089.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 380.000 | - | 380.000 | 570.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 6.089.000 |
| 7. | NON ASN | 380.000 | - | 380.000 | 570.000 | 350.000 | 4.457.000 | 332.000 | 6.089.000 |

14. PROVINSI JAWA TENGAH (KOTA SEMARANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.242.000 | 350.000 | 6.685.000 | 150.000 | 12.047.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 1.480.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 6.265.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 954.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 5.589.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 600.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 5.235.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 600.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 5.185.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 600.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 5.185.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 600.000 | 350.000 | 3.765.000 | 150.000 | 5.185.000 |

15. PROVINSI D.I. YOGYAKARTA (KOTA YOGYAKARTA)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 420.000 | 250.000 | 670.000 | 5.017.000 | 350.000 | 6.910.000 | 236.000 | 13.183.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 420.000 | 150.000 | 570.000 | 2.695.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 7.691.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 420.000 | - | 420.000 | 1.384.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 6.230.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 420.000 | - | 420.000 | 845.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 5.691.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 370.000 | - | 370.000 | 845.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 5.641.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 370.000 | - | 370.000 | 845.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 5.641.000 |
| 7. | NON ASN | 370.000 | - | 370.000 | 845.000 | 350.000 | 3.840.000 | 236.000 | 5.641.000 |

16. PROVINSI JAWA TIMUR (KOTA SURABAYA)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 410.000 | 250.000 | 660.000 | 4.400.000 | 350.000 | 8.140.000 | 388.000 | 13.938.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 410.000 | 150.000 | 560.000 | 1.605.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 7.107.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 410.000 | - | 410.000 | 1.076.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 6.428.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 410.000 | - | 410.000 | 664.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 6.016.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 360.000 | - | 360.000 | 664.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 5.966.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 360.000 | - | 360.000 | 664.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 5.966.000 |
| 7. | NON ASN | 360.000 | - | 360.000 | 664.000 | 350.000 | 4.204.000 | 388.000 | 5.966.000 |

17. PROVINSI BALI (KOTA DENPASAR)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 4.890.000 | 350.000 | 8.140.000 | 318.000 | 14.428.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 1.946.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 7.448.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 990.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 6.342.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 910.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 6.262.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 910.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 6.212.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 910.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 6.212.000 |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 910.000 | 350.000 | 4.204.000 | 318.000 | 6.212.000 |

18. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (KOTA MATARAM)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 440.000 | 250.000 | 690.000 | 3.500.000 | 350.000 | 8.001.000 | 462.000 | 13.003.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 440.000 | 150.000 | 590.000 | 2.648.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 8.756.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 440.000 | - | 440.000 | 1.418.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 7.376.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 440.000 | - | 440.000 | 580.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 6.538.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 390.000 | - | 390.000 | 580.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 6.488.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 390.000 | - | 390.000 | 580.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 6.488.000 |
| 7. | NON ASN | 390.000 | - | 390.000 | 580.000 | 350.000 | 4.706.000 | 462.000 | 6.488.000 |

19. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (KOTA KUPANG)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 360.000 | 250.000 | 610.000 | 3.000.000 | 350.000 | 13.766.000 | 216.000 | 17.942.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 360.000 | 150.000 | 510.000 | 1.493.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 10.431.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 360.000 | - | 360.000 | 1.355.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 10.143.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 360.000 | - | 360.000 | 550.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 9.338.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 310.000 | - | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 9.288.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 310.000 | - | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 9.288.000 |
| 7. | NON ASN | 310.000 | - | 310.000 | 550.000 | 350.000 | 7.862.000 | 216.000 | 9.288.000 |

20. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (KOTA PALANGKARAYA)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 360.000 | 250.000 | 610.000 | 4.901.000 | 350.000 | 9.337.000 | 222.000 | 15.420.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 360.000 | 150.000 | 510.000 | 3.391.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 10.238.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 360.000 | - | 360.000 | 1.160.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 7.857.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 360.000 | - | 360.000 | 659.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 7.356.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 310.000 | - | 310.000 | 659.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 7.306.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 310.000 | - | 310.000 | 659.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 7.306.000 |
| 7. | NON ASN | 310.000 | - | 310.000 | 659.000 | 350.000 | 5.765.000 | 222.000 | 7.306.000 |

21. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (KOTA BANJAR MASIN)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 4.797.000 | 350.000 | 9.605.000 | 300.000 | 15.682.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 3.316.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 10.272.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.500.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 8.306.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 540.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 7.346.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 540.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 7.296.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 540.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 7.296.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 540.000 | 350.000 | 5.776.000 | 300.000 | 7.296.000 |

22. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KOTA BALIK PAPAN)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 430.000 | 250.000 | 680.000 | 4.000.000 | 350.000 | 11.765.000 | 900.000 | 17.695.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 430.000 | 150.000 | 580.000 | 2.188.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 10.596.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 430.000 | - | 430.000 | 1.507.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 9.765.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 430.000 | - | 430.000 | 804.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 9.062.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 9.012.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 9.012.000 |
| 7. | NON ASN | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.578.000 | 900.000 | 9.012.000 |

23. PROVINSI KALIMANTAN UTARA (KOTA TANJUNG SELOR)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 430.000 | 250.000 | 680.000 | 4.000.000 | 350.000 | 12.005.000 | 204.000 | 17.239.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 430.000 | 150.000 | 580.000 | 2.188.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 10.140.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 430.000 | - | 430.000 | 1.507.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 9.309.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 430.000 | - | 430.000 | 804.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 8.606.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 8.556.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 8.556.000 |
| 7. | NON ASN | 380.000 | - | 380.000 | 804.000 | 350.000 | 6.818.000 | 204.000 | 8.556.000 |

24. PROVINSI SULAWESI UTARA (KOTA MANADO)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.919.000 | 350.000 | 12.963.000 | 276.000 | 19.128.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 2.290.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 9.832.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.160.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 8.552.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 782.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 8.174.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 782.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 8.124.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 782.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 8.124.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 782.000 | 350.000 | 6.396.000 | 276.000 | 8.124.000 |

25. PROVINSI GORONTALO (KOTA GORONTALO)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 4.168.000 | 350.000 | 11.584.000 | 480.000 | 17.202.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 2.549.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 11.504.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.431.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 10.236.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 764.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 9.569.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 764.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 9.519.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 764.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 9.519.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 764.000 | 350.000 | 7.605.000 | 480.000 | 9.519.000 |

26. PROVINSI SULAWESI BARAT (KOTA MAMUJU)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH- BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 410.000 | 250.000 | 660.000 | 4.076.000 | 350.000 | 11.648.000 | 626.000 | 17.360.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 410.000 | 150.000 | 560.000 | 2.581.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 11.765.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 410.000 | - | 410.000 | 1.075.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 10.109.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 410.000 | - | 410.000 | 704.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 9.738.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 360.000 | - | 360.000 | 704.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 9.688.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 360.000 | - | 360.000 | 704.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 9.688.000 |
| 7. | NON ASN | 360.000 | - | 360.000 | 704.000 | 350.000 | 7.648.000 | 626.000 | 9.688.000 |

27. PROVINSI SULAWESI SELATAN (KOTA MAKASAR)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH- BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 430.000 | 250.000 | 680.000 | 4.820.000 | 350.000 | 9.915.000 | 290.000 | 16.055.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 430.000 | 150.000 | 580.000 | 1.550.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 8.011.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 430.000 | - | 430.000 | 1.020.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 7.331.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 430.000 | - | 430.000 | 732.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 7.043.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 380.000 | - | 380.000 | 732.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 6.993.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 380.000 | - | 380.000 | 732.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 6.993.000 |
| 7. | NON ASN | 380.000 | - | 380.000 | 732.000 | 350.000 | 5.241.000 | 290.000 | 6.993.000 |

28. PROVINSI SULAWESI TENGAH (KOTA PALU)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH- BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 370.000 | 250.000 | 620.000 | 2.309.000 | 350.000 | 13.701.000 | 330.000 | 17.310.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 370.000 | 150.000 | 520.000 | 2.027.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 11.121.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 370.000 | - | 370.000 | 1.567.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 10.511.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 370.000 | - | 370.000 | 951.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 9.895.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 320.000 | - | 320.000 | 951.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 9.845.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 320.000 | - | 320.000 | 951.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 9.845.000 |
| 7. | NON ASN | 320.000 | - | 320.000 | 951.000 | 350.000 | 7.894.000 | 330.000 | 9.845.000 |

29. PROVINSI SULAWESI TENGGARA (KOTA KENDARI)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH- BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 2.475.000 | 350.000 | 12.011.000 | 342.000 | 15.808.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 2.059.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 10.244.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.297.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 9.332.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 786.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 8.821.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 786.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 8.771.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 786.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 8.771.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 786.000 | 350.000 | 6.963.000 | 342.000 | 8.771.000 |

30. PROVINSI MALUKU (KOTA AMBON)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH- BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 380.000 | 250.000 | 630.000 | 3.467.000 | 350.000 | 17.638.000 | 480.000 | 22.565.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 380.000 | 150.000 | 530.000 | 3.240.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 14.462.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 380.000 | - | 380.000 | 1.048.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 12.120.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 380.000 | - | 380.000 | 667.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 11.739.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 330.000 | - | 330.000 | 667.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 11.689.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 330.000 | - | 330.000 | 667.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 11.689.000 |
| 7. | NON ASN | 330.000 | - | 330.000 | 667.000 | 350.000 | 9.862.000 | 480.000 | 11.689.000 |

31. PROVINSI MALUKU UTARA (KOTA TERNATE)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 430.000 | 250.000 | 680.000 | 3.440.000 | 350.000 | 14.354.000 | s | #VALUE! |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 430.000 | 150.000 | 580.000 | 3.175.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 13.980.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 430.000 | - | 430.000 | 1.073.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 11.728.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 430.000 | - | 430.000 | 600.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 11.255.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 380.000 | - | 380.000 | 600.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 11.205.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 380.000 | - | 380.000 | 600.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 11.205.000 |
| 7. | NON ASN | 380.000 | - | 380.000 | 600.000 | 350.000 | 9.445.000 | 430.000 | 11.205.000 |

32. PROVINSI PAPUA (KOTA JAYAPURA)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 580.000 | 250.000 | 830.000 | 3.859.000 | 350.000 | 18.921.000 | 862.000 | 24.822.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 580.000 | 150.000 | 730.000 | 3.318.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 16.234.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 580.000 | - | 580.000 | 2.521.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 15.287.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 580.000 | - | 580.000 | 829.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 13.595.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 530.000 | - | 530.000 | 829.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 13.545.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 530.000 | - | 530.000 | 829.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 13.545.000 |
| 7. | NON ASN | 530.000 | - | 530.000 | 829.000 | 350.000 | 10.974.000 | 862.000 | 13.545.000 |

33. PROVINSI PAPUA BARAT (KOTA MONOKWARI)

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | | JUMLAH |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (Jih H-1) 2) | BIAYA TRANSPORTASI (PP) 3) | | | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | MEMPAWAH-BANDARA *1) | TIKET PESAWAT *2) | BANDARA TUJUAN *3) | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 480.000 | 250.000 | 730.000 | 3.872.000 | 350.000 | 20.579.000 | 364.000 | 25.895.000 |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 480.000 | 150.000 | 630.000 | 3.212.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 18.161.000 |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 480.000 | - | 480.000 | 2.056.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 16.855.000 |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 480.000 | - | 480.000 | 718.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 15.517.000 |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 430.000 | - | 430.000 | 718.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 15.467.000 |
| 6. | NON PNS/P3K | 430.000 | - | 430.000 | 718.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 15.467.000 |
| 7. | NON ASN | 430.000 | - | 430.000 | 718.000 | 350.000 | 13.605.000 | 364.000 | 15.467.000 |

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Refrepretasi dibayarkan secara Lumpsum per hari dan diklasifikasikan berdasarkan biaya Regional sesuai daerah Tujuan.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Taksi Tempat Bertugas ke Bandara (Supadio) dibayarkan secara at Lumpsum.
4. Biaya Tiket Pesawat dibayarkan secara at cost dan dan biaya taksi Bandara mengikuti ketentuan standar pada huruf C angka 1
5. Biaya Taksi Bandara ke Tempat Tujuan dibayarkan secara Lumpsum.

E. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR LUAR PROVINSI DALAM PULAU KALIMANTAN

1. DARI MEMPAWAH KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | MODA TRANSPORTASI |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|--|------------------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3) | TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN TENGAH | JUMLAH | |
| | | UANG HARIAN | UANG REFRESENTASI | JUMLAH | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 360.000 | 250.000 | 610.000 | 4.901.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 360.000 | 150.000 | 510.000 | 3.391.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 360.000 | - | 360.000 | 1.160.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 360.000 | - | 360.000 | 659.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 360.000 | - | 360.000 | 659.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 6. | NON PNS/P3K | 360.000 | - | 360.000 | 659.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |
| 7. | NON ASN | 360.000 | - | 360.000 | 659.000 | 1.500.000 | Perjalanan Darat | |

2. DARI MEMPAWAH KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

| NO. | PEJABAT/PEGAWAI | KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|---|------------------|-------------------|
| | | DIBERIKAN PER HARI 1) | | | BIAYA PENGINAPAN (H-1) *3) | TRANSPORT DARI MEMPAWAH KE KALIMANTAN SELATAN | JUMLAH | MODA TRANSPORTASI |
| | | UANG HARIAN | UANG REPRESENTASI | JUMLAH | | | | |
| 1. | BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD | 360.000 | 250.000 | 610.000 | 4.797.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 2. | ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II | 360.000 | 150.000 | 510.000 | 3.316.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 3. | ESELON III/GOLONGAN IV | 360.000 | - | 360.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 4. | ESELON IV/GOLONGAN III | 360.000 | - | 360.000 | 540.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 5. | GOLONGAN II/GOLONGAN I | 360.000 | - | 360.000 | 540.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 6. | NON PNS/P3K | 360.000 | - | 360.000 | 540.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |
| 7. | NON ASN | 360.000 | - | 360.000 | 540.000 | 1.750.000 | Perjalanan Darat | |

KETERANGAN :

1. Uang Harian, Uang Representasi dibayarkan per hari secara Lumpsum.
2. Biaya Penginapan dibayarkan secara at cost tidak termasuk tambahan biaya layanan dan laundry
3. Biaya Transport dibayarkan secara lumpsum

F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA

| NO. | PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA) | KE KABUPATEN / KOTA | SATUAN | JUMLAH / BESARAN |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|----------|------------------|
| 1. | PROVINSI ACEH DARUSSALAM | | | |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH BARAT | ORANG/PP | Rp 550.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH BARAT DAYA | ORANG/PP | Rp 596.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH BESAR | ORANG/PP | Rp 366.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH JAYA | ORANG/PP | Rp 476.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH SELATAN | ORANG/PP | Rp 650.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH SINGKIL | ORANG/PP | Rp 840.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH TAMIANG | ORANG/PP | Rp 630.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH TENGAH | ORANG/PP | Rp 586.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH TENGGARA | ORANG/PP | Rp 920.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH TIMUR | ORANG/PP | Rp 578.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. ACEH UTARA | ORANG/PP | Rp 540.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. BENER MERIAH | ORANG/PP | Rp 556.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. BIREUEN | ORANG/PP | Rp 440.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. GAYO LUES | ORANG/PP | Rp 740.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. NAGAN RAYA | ORANG/PP | Rp 550.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. PIDIE | ORANG/PP | Rp 380.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. PIDIE JYA | ORANG/PP | Rp 410.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. LANGSA | ORANG/PP | Rp 602.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. LHOKEUMAWE | ORANG/PP | Rp 480.000 |
| | BANDA ACEH | KAB. SUBULUSSALAM | ORANG/PP | Rp 800.000 |
| 2. | PROVINSI SUMATERA UTARA | | | |
| | MEDAN | KAB. ASAHAN | ORANG/PP | Rp 518.000 |
| | MEDAN | KAB. BATUBARA | ORANG/PP | Rp 450.000 |
| | MEDAN | KAB. DAIRI | ORANG/PP | Rp 540.000 |
| | MEDAN | KAB. DELI SERDANG | ORANG/PP | Rp 372.000 |
| | MEDAN | KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | ORANG/PP | Rp 600.000 |
| | MEDAN | KAB. KARO | ORANG/PP | Rp 400.000 |
| | MEDAN | KAB. LABUHAN BATU | ORANG/PP | Rp 574.000 |
| | MEDAN | KAB. LABUHAN BATU SELATAN | ORANG/PP | Rp 720.000 |
| | MEDAN | KAB. LABUHAN BATU UTARA | ORANG/PP | Rp 600.000 |
| | MEDAN | KAB. LANGKAT | ORANG/PP | Rp 372.000 |
| | MEDAN | KAB. MANDAILING NATAL | ORANG/PP | Rp 840.000 |
| | MEDAN | KAB. PADANG LAWAS | ORANG/PP | Rp 840.000 |
| | MEDAN | KAB. PADANG LAWAS UTARA | ORANG/PP | Rp 840.000 |
| | MEDAN | KAB. PAKPAK BARAT | ORANG/PP | Rp 600.000 |
| | MEDAN | KAB. SAMOSIR | ORANG/PP | Rp 660.000 |
| | MEDAN | KAB. SERDANG BEDAGAI | ORANG/PP | Rp 400.000 |
| | MEDAN | KAB. SIMALUNGUN | ORANG/PP | Rp 528.000 |
| | MEDAN | KAB. TAPANULI SELATAN | ORANG/PP | Rp 656.000 |
| | MEDAN | KAB. TAPANULI TENGAH | ORANG/PP | Rp 690.000 |
| | MEDAN | KAB. TAPANULI UTARA | ORANG/PP | Rp 660.000 |
| | MEDAN | KAB. TOBA SAMOSIR | ORANG/PP | Rp 600.000 |
| | MEDAN | KAB. BINJAI | ORANG/PP | Rp 360.000 |
| | MEDAN | KAB. PEMATANG SIANTAR | ORANG/PP | Rp 450.000 |
| | MEDAN | KAB. SIBOLGA | ORANG/PP | Rp 690.000 |
| | MEDAN | KAB. TANJUNG BALAI | ORANG/PP | Rp 570.000 |
| | MEDAN | KAB. TEBING TINGGI | ORANG/PP | Rp 406.000 |
| 3. | PROVINSI RIAU | | | |
| | PEKANBARU | KAB. INDRAGIRI HILIR | ORANG/PP | Rp 760.000 |
| | PEKANBARU | KAB. INDRAGIRI HULU | ORANG/PP | Rp 630.000 |
| | PEKANBARU | KAB. KAMPAR | ORANG/PP | Rp 400.000 |
| | PEKANBARU | KAB. KUANTAN SENGIGI | ORANG/PP | Rp 600.000 |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------|----|---------|
| | PEKANBARU | KAB. PELALAWAN | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | PEKANBARU | KAB. ROKAN HILIR | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | PEKANBARU | KAB. ROKAN HULU | ORANG/PP | Rp | 644.000 |
| | PEKANBARU | KAB. SIAK | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | PEKANBARU | KAB. DUMAI | ORANG/PP | Rp | 800.000 |
| | | | | | |
| 4. | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | | | | |
| | TANJUNG PINANG | KAB. BINTAN | ORANG/PP | Rp | 370.000 |
| | | | | | |
| 5. | PROVINSI JAMBI | | | | |
| | JAMBI | KAB. BATANG HARI | ORANG/PP | Rp | 350.000 |
| | JAMBI | KAB. BUNGO | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | JAMBI | KAB. KERINCI | ORANG/PP | Rp | 650.000 |
| | JAMBI | KAB. MERANI | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | JAMBI | KAB. MUARO JAMBI | ORANG/PP | Rp | 340.000 |
| | JAMBI | KAB. SAROLANGUN | ORANG/PP | Rp | 482.000 |
| | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG BARAT | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | JAMBI | KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR | ORANG/PP | Rp | 380.000 |
| | JAMBI | KAB. TEBO | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | JAMBI | KAB. SUNGAI PENUH | ORANG/PP | Rp | 616.000 |
| | | | | | |
| 6. | PROVINSI SUMATERA BARAT | | | | |
| | PADANG | KAB. AGAM | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | PADANG | KAB. DHARMASRAYA | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PADANG | KAB. LIMA PULUH KOTA | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | PADANG | KAB. PADANG PARIAMAN | ORANG/PP | Rp | 410.000 |
| | PADANG | KAB. PASAMAN | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PADANG | KAB. PASAMAN BARAT | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PADANG | KAB. PESISIR SELATAN | ORANG/PP | Rp | 410.000 |
| | PADANG | KAB. SIJUNJUNG | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | PADANG | KAB. SOLOK | ORANG/PP | Rp | 420.000 |
| | PADANG | KAB. TANAH DATAR | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PADANG | KOTA BUKIT TINGGI | ORANG/PP | Rp | 440.000 |
| | PADANG | KOTA PADANG PANJANG | ORANG/PP | Rp | 430.000 |
| | PADANG | KOTA PARIAMAN | ORANG/PP | Rp | 420.000 |
| | PADANG | KOTA PAYAKUMBUH | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | PADANG | KOTA SAWAHLUNTO | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | PADANG | KOTA SOLOK | ORANG/PP | Rp | 430.000 |
| | | | | | |
| 7. | PROVINSI SUMATERA SELATAN | | | | |
| | PALEMBANG | KAB. BANYU ASIN | ORANG/PP | Rp | 406.000 |
| | PALEMBANG | KAB. EMPAT LAWANG | ORANG/PP | Rp | 630.000 |
| | PALEMBANG | KAB. LAHAT | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PALEMBANG | KAB. MUARA ENIM | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | PALEMBANG | KAB. MUSI BANYU ASIN | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | PALEMBANG | KAB. MUSI RAWAS | ORANG/PP | Rp | 640.000 |
| | PALEMBANG | KAB. MUSI RAWAS UTARA | ORANG/PP | Rp | 650.000 |
| | PALEMBANG | KAB. OGAN HILIR | ORANG/PP | Rp | 410.000 |
| | PALEMBANG | KAB. OGAN KOMERING ILIR | ORANG/PP | Rp | 410.000 |
| | PALEMBANG | KAB. OGAN KOMERING ULU | ORANG/PP | Rp | 496.000 |
| | PALEMBANG | KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PALEMBANG | KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | PALEMBANG | KAB. PALIH | ORANG/PP | Rp | 530.000 |
| | PALEMBANG | KAB. LUBUK LINGGAU | ORANG/PP | Rp | 580.000 |
| | PALEMBANG | KAB. PAGAR ALAM | ORANG/PP | Rp | 560.000 |
| | PALEMBANG | KAB. PRAMBULIH | ORANG/PP | Rp | 410.000 |
| | | | | | |
| 8. | PROVINSI LAMPUNG | | | | |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. LAMPUNG BARAT | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. LAMPUNG SELATAN | ORANG/PP | Rp | 468.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TENGAH | ORANG/PP | Rp | 492.000 |

| | | | | | |
|------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----|---------|
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. LAMPUNG TIMUR | ORANG/PP | Rp | 492.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. LAMPUNG UTARA | ORANG/PP | Rp | 504.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. MESUJI | ORANG/PP | Rp | 552.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. PESAWARAN | ORANG/PP | Rp | 432.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. PESISIR BARAT | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. PRINGSEWU | ORANG/PP | Rp | 444.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. TANGGAMUS | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG | ORANG/PP | Rp | 504.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. TULANG BAWANG BARAT | ORANG/PP | Rp | 534.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KAB. WAI KANAN | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | BANDAR LAMPUNG | KOTA METRO | ORANG/PP | Rp | 468.000 |
| | | | | | |
| 9. | PROVINSI BENGKULU | | | | |
| | BENGKULU | KAB. BENGKULU SELATAN | ORANG/PP | Rp | 688.000 |
| | BENGKULU | KAB. BENGKULU TENGAH | ORANG/PP | Rp | 464.000 |
| | BENGKULU | KAB. BENGKULU UTARA | ORANG/PP | Rp | 526.000 |
| | BENGKULU | KAB. KAUR | ORANG/PP | Rp | 770.000 |
| | BENGKULU | KAB. KEPAHANG | ORANG/PP | Rp | 596.000 |
| | BENGKULU | KAB. LEBONG | ORANG/PP | Rp | 750.000 |
| | BENGKULU | KAB. MUKO MUKO | ORANG/PP | Rp | 846.000 |
| | BENGKULU | KAB. REJANG LEBONG | ORANG/PP | Rp | 626.000 |
| | BENGKULU | KAB. SELUMA | ORANG/PP | Rp | 564.000 |
| | | | | | |
| 10. | PROVINSI BANGKA BELITUNG | | | | |
| | PANGKALPINANG | KAB. BANGKA | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PANGKALPINANG | KAB. BANGKA BARAT | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | PANGKALPINANG | KAB. BANGKA SELATAN | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | PANGKALPINANG | KAB. BANGKA TENGAH | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | | | | | |
| 11. | PROVINSI DKI JAKARTA | | | | |
| | JAKARTA | KOTA BEKASI | ORANG/PP | Rp | 496.000 |
| | JAKARTA | KAB. BEKASI | ORANG/PP | Rp | 496.000 |
| | JAKARTA | KAB. BOGOR | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | JAKARTA | KOTA BOGOR | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | JAKARTA | KOTA DEPOK | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | JAKARTA | KOTA TANGERANG | ORANG/PP | Rp | 572.000 |
| | JAKARTA | KOTA TANGERANG SELATAN | ORANG/PP | Rp | 572.000 |
| | JAKARTA | KAB. TANGERANG | ORANG/PP | Rp | 620.000 |
| | JAKARTA | KEPULAUAN SERIBU | ORANG/PP | Rp | 856.000 |
| | | | | | |
| 12. | PROVINSI BANTEN | | | | |
| | SERANG | KAB. LEBAK | ORANG/PP | Rp | 416.000 |
| | SERANG | KAB. PANDEGLANG | ORANG/PP | Rp | 276.000 |
| | SERANG | KAB. SERANG | ORANG/PP | Rp | 320.000 |
| | SERANG | KAB. TANGERANG | ORANG/PP | Rp | 508.000 |
| | SERANG | KOTA CILEGON | ORANG/PP | Rp | 320.000 |
| | SERANG | KOTA TANGERANG | ORANG/PP | Rp | 626.000 |
| | SERANG | KOTA TANGERANG SELATAN | ORANG/PP | Rp | 694.000 |
| | | | | | |
| 13. | PROVINSI JAWA BARAT | | | | |
| | BANDUNG | KAB. BANDUNG | ORANG/PP | Rp | 366.000 |
| | BANDUNG | KAB. BANDUNG BARAT | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | BANDUNG | KAB. BEKASI | ORANG/PP | Rp | 530.000 |
| | BANDUNG | KAB. BOGOR | ORANG/PP | Rp | 370.000 |
| | BANDUNG | KAB. CIAMIS | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | BANDUNG | KAB. CIANJUR | ORANG/PP | Rp | 430.000 |
| | BANDUNG | KAB. CIEBON | ORANG/PP | Rp | 560.000 |
| | BANDUNG | KAB. GARUT | ORANG/PP | Rp | 486.000 |
| | BANDUNG | KAB. INDRAMAYU | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | BANDUNG | KAB. KARAWANG | ORANG/PP | Rp | 496.000 |
| | BANDUNG | KAB. KUNINGAN | ORANG/PP | Rp | 550.000 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------|----------|----|---------|
| | BANDUNG | KAB. MAJALENGKA | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | BANDUNG | KAB. PANGANDARAN | ORANG/PP | Rp | 566.000 |
| | BANDUNG | KAB. PURWAKARTA | ORANG/PP | Rp | 436.000 |
| | BANDUNG | KAB. SUBANG | ORANG/PP | Rp | 416.000 |
| | BANDUNG | KAB. SUKABUMI | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | BANDUNG | KAB. SUMEDANG | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | BANDUNG | KAB. TASIK MALAYA | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | BANDUNG | KOTA BANJAR | ORANG/PP | Rp | 566.000 |
| | BANDUNG | KOTA BEKASI | ORANG/PP | Rp | 530.000 |
| | BANDUNG | KOTA BOGOR | ORANG/PP | Rp | 570.000 |
| | BANDUNG | KOTA CIMAHI | ORANG/PP | Rp | 336.000 |
| | BANDUNG | KOTA CIREBON | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | BANDUNG | KOTA DEPOK | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | BANDUNG | KOTA SUKABUMI | ORANG/PP | Rp | 452.000 |
| | BANDUNG | KOTA TASIKMALAYA | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | | | | | |
| 14. | PROVINSI JAWA TENGAH | | | | |
| | SEMARANG | KAB. BANJAR NEGARA | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | SEMARANG | KAB. BANYUMAS | ORANG/PP | Rp | 514.000 |
| | SEMARANG | KAB. BATANG | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. BLORA | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | SEMARANG | KAB. BOYOLALI | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. BREBES | ORANG/PP | Rp | 526.000 |
| | SEMARANG | KAB. CILACAP | ORANG/PP | Rp | 560.000 |
| | SEMARANG | KAB. DEMAK | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | SEMARANG | KAB. GROBOKAN | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SEMARANG | KAB. JEPARA | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. KARANGANYAR | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. KEBUMEN | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | SEMARANG | KAB. KENDAL | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | SEMARANG | KAB. KLATEN | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. KUDUS | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SEMARANG | KAB. MAGELANG | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. PATI | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. PEKALONGAN | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SEMARANG | KAB. PEMALANG | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. PURBALINGGA | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | SEMARANG | KAB. PURWOKERTO | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. REMBANG | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. SEMARANG | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | SEMARANG | KAB. SRAGEN | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. SUKOHARJO | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. TEGAL | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | SEMARANG | KAB. TEMANGGUNG | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KAB. WONOGIRI | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KAB. WONOSOBO | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | SEMARANG | KOTA MAGELANG | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SEMARANG | KOTA PEKALONGAN | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SEMARANG | KOTA SALATIGA | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SEMARANG | KOTA SURAKARTA | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SEMARANG | KOTA TEGAL | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | | | | | |
| 15. | PROVINSI DIY | | | | |
| | YOGYAKARTA | KAB. BANTUL | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | YOGYAKARTA | KAB. GUNUNGKIDUL | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | YOGYAKARTA | KAB. KULONPROGO | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | YOGYAKARTA | KAB. SLEMAN | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | | | | | |
| 16. | PROVINSI JAWA TIMUR | | | | |
| | SURABAYA | KAB. BANGKALAN | ORANG/PP | Rp | 450.000 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|----------|----|---------|
| | SURABAYA | KAB. BANYUWANGI | ORANG/PP | Rp | 570.000 |
| | SURABAYA | KAB. BLITAR | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | KAB. BOJONEGORO | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KAB. BONDOWOSO | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | KAB. GRESIK | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KAB. JEMBER | ORANG/PP | Rp | 522.000 |
| | SURABAYA | KAB. JOMBANG | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SURABAYA | KAB. KEDIRI | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SURABAYA | KAB. LAMONGAN | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KAB. LUMAJANG | ORANG/PP | Rp | 522.000 |
| | SURABAYA | KAB. MADIUN | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KAB. MAGETAN | ORANG/PP | Rp | 506.000 |
| | SURABAYA | KAB. MALANG | ORANG/PP | Rp | 456.000 |
| | SURABAYA | KAB. MOJOKERTO | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KAB. NGANJUK | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KAB. NGAWI | ORANG/PP | Rp | 506.000 |
| | SURABAYA | KAB. PACITAN | ORANG/PP | Rp | 570.000 |
| | SURABAYA | KAB. PAMEKASAN | ORANG/PP | Rp | 486.000 |
| | SURABAYA | KAB. PASURUAN | ORANG/PP | Rp | 456.000 |
| | SURABAYA | KAB. PONOROGO | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | KAB. PROBOLINGGO | ORANG/PP | Rp | 456.000 |
| | SURABAYA | KAB. SAMPANG | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SURABAYA | KAB. SIDOARJO | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | SURABAYA | KAB. SITUBONDO | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | KAB. SUMENEP | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | TREANGGALEK | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KAB. TUBAN | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KAB. TULUNGAGUNG | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KOTA BATU | ORANG/PP | Rp | 484.000 |
| | SURABAYA | KOTA BLITAR | ORANG/PP | Rp | 510.000 |
| | SURABAYA | KOTA BOJONEGORO | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KOTA KEDIRI | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | SURABAYA | KOTA MADIUN | ORANG/PP | Rp | 490.000 |
| | SURABAYA | KOTA MALANG | ORANG/PP | Rp | 456.000 |
| | SURABAYA | KOTA MOJOKERTO | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | SURABAYA | KOTA PROBOLINGGO | ORANG/PP | Rp | 456.000 |
| | | | | | |
| 17. | PROVINSI BALI | | | | |
| | DENPASAR | KAB. BADUNG | ORANG/PP | Rp | 376.000 |
| | DENPASAR | KAB. BANGLI | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | DENPASAR | KAB. BULELENG | ORANG/PP | Rp | 530.000 |
| | DENPASAR | KAB. GIANYAR | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | DENPASAR | KAB. JEMBRANA | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | DENPASAR | KAB. KARANGASEM | ORANG/PP | Rp | 526.000 |
| | DENPASAR | KAB. TABANAN | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | | | | | |
| 18. | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | | | | |
| | MATARAM | KAB. LOMBOK BARAT | ORANG/PP | Rp | 650.000 |
| | MATARAM | KAB. LOMBOK TENGAH | ORANG/PP | Rp | 900.000 |
| | MATARAM | KAB. LOMBOK TIMUR | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | | | | | |
| 19. | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | | | | |
| | KUPANG | KAB. BELU | ORANG/PP | Rp | 650.000 |
| | KUPANG | KAB. KUPANG | ORANG/PP | Rp | 350.000 |
| | KUPANG | KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | ORANG/PP | Rp | 436.000 |
| | KUPANG | KAB. TIMOR TENGAH UTARA | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | | | | | |
| 20. | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | | | | |
| | PALANGKARAYA | KAB. BARITO SELATAN | ORANG/PP | Rp | 580.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. BARITO TIMUR | ORANG/PP | Rp | 666.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. BARITO UTARA | ORANG/PP | Rp | 850.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. GUNUNG MAS | ORANG/PP | Rp | 600.000 |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|----|-----------|
| | PALANGKARAYA | KAB. KAPUAS | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. KATINGAN | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | ORANG/PP | Rp | 850.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. LAMANDAU | ORANG/PP | Rp | 1.050.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. MURUNGJAYA | ORANG/PP | Rp | 896.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. PULANGPISAU | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. SERUYAN | ORANG/PP | Rp | 656.000 |
| | PALANGKARAYA | KAB. SUKAMARA | ORANG/PP | Rp | 1.050.000 |
| | | | | | |
| 21. | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | | | | |
| | BANJAR MASIN | KAB. BALANGAN | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. BANJAR | ORANG/PP | Rp | 340.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. BARITO KUALA | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. HULU SUNGAI SELATAN | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. HULU SUNGAI TENGAH | ORANG/PP | Rp | 424.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. HULU SUNGAI UTARA | ORANG/PP | Rp | 436.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. KOTA BARU | ORANG/PP | Rp | 580.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. TABALONG | ORANG/PP | Rp | 468.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. TANAH BUMBU | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. TANAH LAUT | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | BANJAR MASIN | KAB. TAPIN | ORANG/PP | Rp | 378.000 |
| | BANJAR MASIN | KOTA BANJAR MASIN | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | | | | | |
| 22. | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | | | | |
| | SAMARINDA | KAB. KUTAI BARAT | ORANG/PP | Rp | 3.000.000 |
| | SAMARINDA | KAB. KUTAI KARTANEGARA | ORANG/PP | Rp | 1.000.000 |
| | SAMARINDA | KAB. KUTAI TIMUR | ORANG/PP | Rp | 2.700.000 |
| | SAMARINDA | KAB. PASER | ORANG/PP | Rp | 3.300.000 |
| | SAMARINDA | KAB. PENAJAM PASER UTARA | ORANG/PP | Rp | 1.300.000 |
| | SAMARINDA | KOTA BALIKPAPAN | ORANG/PP | Rp | 1.100.000 |
| | SAMARINDA | KOTA BONTANG | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | | | | | |
| 23. | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | | | | |
| | TANJUNG SELOR | KAB NUNUKAN | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | TANJUNG SELOR | KAB. MALINAU | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | TANJUNG SELOR | KAB. BULUNGAN | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | TANJUNG SELOR | KAB. TANA TIDUNG | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | TANJUNG SELOR | KOTA TARAKAN | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | | | | | |
| 24. | PROVINSI SULAWESI UTARA | | | | |
| | MANADO | KAB. BOLAANG MONGONDOW | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | MANADO | KAB. BOLAANG MONGONDOW SLTN | ORANG/PP | Rp | 550.000 |
| | MANADO | KAB. BOLAANG MONGONDOW TMR | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | MANADO | KAB. BOLAANG MONGONDOW UTR | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | MANADO | KAB. MINAHASA | ORANG/PP | Rp | 360.000 |
| | MANADO | KAB. MINAHASA SELATAN | ORANG/PP | Rp | 360.000 |
| | MANADO | KAB. MINAHASA TENGGARA | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | MANADO | KAB. MINAHASA UTARA | ORANG/PP | Rp | 350.000 |
| | MANADO | KOTA BITUNG | ORANG/PP | Rp | 350.000 |
| | MANADO | KOTA KOTAMOBAGU | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | MANADO | KOTA TOMOHON | ORANG/PP | Rp | 340.000 |
| | | | | | |
| 25. | PROVINSI GORONTALO | | | | |
| | GORONTALO | KAB. BOLAEMO | ORANG/PP | Rp | 800.000 |
| | GORONTALO | KAB. GORONTALO | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | GORONTALO | KAB. GORONTALO UTARA | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | GORONTALO | KAB. PAHUWATO | ORANG/PP | Rp | 1.300.000 |
| | | | | | |
| 26. | PROVINSI SULAWESI BARAT | | | | |
| | MAMUJU | KAB. MAJENE | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | MAMUJU | KAB. MAMASA | ORANG/PP | Rp | 718.000 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------|----------|----|-----------|
| | MAMUJU | KAB. MAMUJU TENGAH | ORANG/PP | Rp | 400.000 |
| | MAMUJU | KAB. MAMUJU UTARA | ORANG/PP | Rp | 540.000 |
| | MAMUJU | KAB. POLEWALI MANDAR | ORANG/PP | Rp | 520.000 |
| | | | | | |
| 27. | PROVINSI SULAWESI SELATAN | | | | |
| | MAKASSAR | KAB. BANTAENG | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | MAKASSAR | KAB. BARRU | ORANG/PP | Rp | 420.000 |
| | MAKASSAR | KAB. BONE | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | MAKASSAR | KAB. BULUKUMBA | ORANG/PP | Rp | 480.000 |
| | MAKASSAR | KAB. ENGREGANG | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | MAKASSAR | KAB. GOWA | ORANG/PP | Rp | 350.000 |
| | MAKASSAR | KAB. JENEPONTO | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | MAKASSAR | KAB. LUWU | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | MAKASSAR | KAB. LUWU TIMUR | ORANG/PP | Rp | 750.000 |
| | MAKASSAR | KAB. LUWU UTARA | ORANG/PP | Rp | 730.000 |
| | MAKASSAR | KAB. MAROS | ORANG/PP | Rp | 340.000 |
| | MAKASSAR | KAB. PINRANG | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | MAKASSAR | KAB. SIDENRENG RAPPANG | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | MAKASSAR | KAB. SINJAI | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | MAKASSAR | KAB. SOPPENG | ORANG/PP | Rp | 470.000 |
| | MAKASSAR | KAB. TAKALAR | ORANG/PP | Rp | 380.000 |
| | MAKASSAR | KAB. TANA TORAJA | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | MAKASSAR | KAB. TORAJA UTARA | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | MAKASSAR | KAB. WAJO | ORANG/PP | Rp | 460.000 |
| | MAKASSAR | KOTA PALOPO | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | MAKASSAR | KOTA PARE PARE | ORANG/PP | Rp | 450.000 |
| | | | | | |
| 28. | PROVINSI SULAWESI TENGAH | | | | |
| | PALU | KAB. LUWUK | ORANG/PP | Rp | 800.000 |
| | PALU | KAB. BUOL | ORANG/PP | Rp | 944.000 |
| | PALU | KAB. DONGGALA | ORANG/PP | Rp | 260.000 |
| | PALU | KAB. MOROWALI | ORANG/PP | Rp | 800.000 |
| | PALU | KAB. MOROWALI UTARA | ORANG/PP | Rp | 800.000 |
| | PALU | KAB. PARIGI MOUTONG | ORANG/PP | Rp | 500.000 |
| | PALU | KAB. POSO | ORANG/PP | Rp | 560.000 |
| | PALU | KAB. SIGI | ORANG/PP | Rp | 438.000 |
| | PALU | KAB. TOJOUNA UNA | ORANG/PP | Rp | 700.000 |
| | PALU | KAB. TOLI TOLI | ORANG/PP | Rp | 824.000 |
| | | | | | |
| 29. | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | | | | |
| | KENDARI | KAB. BOMBANA | ORANG/PP | Rp | 710.000 |
| | KENDARI | KAB. KOLAKA | ORANG/PP | Rp | 740.000 |
| | KENDARI | KAB. KOLAKA TIMUR | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | KENDARI | KAB. KOLAKA UTARA | ORANG/PP | Rp | 850.000 |
| | KENDARI | KAB. KONAWA | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | KENDARI | KAB. KONAWA SELATAN | ORANG/PP | Rp | 610.000 |
| | KENDARI | KAB. KONAWA UTARA | ORANG/PP | Rp | 600.000 |
| | | | | | |
| 30. | PROVINSI MALUKU UTARA | | | | |
| | SOFIFI | KAB. HALMAHERA BARAT | ORANG/PP | Rp | 1.700.000 |
| | SOFIFI | KAB. HALMAHERA TENGAH | ORANG/PP | Rp | 2.000.000 |
| | SOFIFI | KAB. HALMAHERA TIMUR | ORANG/PP | Rp | 2.500.000 |
| | SOFIFI | KAB. HALMAHERA UTARA | ORANG/PP | Rp | 1.800.000 |
| | | | | | |
| 31. | PROVINSI PAPUA | | | | |
| | JAYAPURA | KAB. JAYAPURA | ORANG/PP | Rp | 1.200.000 |
| | JAYAPURA | KAB. KEEROM | ORANG/PP | Rp | 1.800.000 |
| | JAYAPURA | KAB. SARMI | ORANG/PP | Rp | 5.400.000 |
| | JAYAPURA | KAB. MERAUKE | ORANG/PP | Rp | 2.268.000 |
| | | | | | |
| 32. | PROVINSI PAPUA BARAT | | | | |
| | MANOKWARI | KAB. TELUK BINTUNI | ORANG/PP | Rp | 1.800.000 |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------------|----------|----|-----------|
| | MANOKWARI | KAB. MANOKWARI SELATAN | ORANG/PP | Rp | 1.500.000 |
| | MANOKWARI | KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | ORANG/PP | Rp | 5.300.000 |
| | MANOKWARI | KOTA SORONG | ORANG/PP | Rp | 2.000.000 |
| | | | | | |

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBU KOTA KECAMATAN KE DESA/KELURAHAN

| NO. | PROVISI (IBU KOTA KAB/KOTA) | KE KABUPATEN / KOTA | SATUAN | JUMLAH / BESARAN |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|
| 1. | KECAMATAN MEMPAWAH HILIR | | | |
| | KELURAHAN TERUSAN | KELURAHAN TERUSAN | ORANG/PP | Rp - |
| | KELURAHAN TERUSAN | KELURAHAN TENGAH | ORANG/PP | Rp - |
| | KELURAHAN TERUSAN | KELURAHAN TANJUNG | ORANG/PP | Rp - |
| | KELURAHAN TERUSAN | DESA SENGKUBANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN TERUSAN | DESA PENIBUNG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN TERUSAN | DESA PASIR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN TERUSAN | DESA KUALA SECAPAH | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN TERUSAN | DESA MALIKIAN | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| 2. | KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR | | | |
| | DESA ANTIBAR | DESA ANTIBAR | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA ANTIBAR | KELURAHAN PULAU PEDALAMAN | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA ANTIBAR | KELURAHAN PASIR WAN SALIM | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA ANTIBAR | DESA PASIR PANJANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA ANTIBAR | DESA PASIR PALEMBANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA ANTIBAR | DESA SUNGAI BAKAU KECIL | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA ANTIBAR | DESA SEJEGI | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA ANTIBAR | DESA PARIT BANJAR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| 3. | KECAMATAN SUNGAI KUNYIT | | | |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI KUNYIT DALAM | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI KUNYIT HULU | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI BUNDUNG LAUT | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SEMUDUN | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI LIMAU | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA MENDALOK | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI DURI I | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI DURI II | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SUNGAI DUNGUN | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA BUKIT BATU | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA SUNGAI KUNYIT LAUT | DESA SEMPARONG PARET RADEN | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| 4. | KECAMATAN SUNGAI PINYUH | | | |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA SUNGAI BATANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA SUNGAI BAKAU BESAR LAUT | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA SUNGAI BAKAU BESAR DARAT | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA SUNAI RASAU | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA NUSA PATI | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA GALANG | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA PENIRAMAN | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | KELURAHAN SUNGAI PINYUH | DESA SUNGAI PURUN KECIL | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| 5. | KECAMATAN ANJONGAN | | | |
| | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | ORANG/PP | Rp - |
| | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | DESA ANJONGAN DALAM | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | DESA DEMA | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | DESA KEPAYANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR | DESA PAK BULU | ORANG/PP | Rp 50.000 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 6. | KECAMATAN TOHO | | | |
| | DESA PAK LAHENG | DESA PAK LAHENG | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA PAK LAHENG | DESA TOHO ILIR | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA PAK LAHENG | DESA SEPANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PAK LAHENG | DESA PAK UTAN | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PAK LAHENG | DESA TERAP | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PAK LAHENG | DESA KECURIT | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PAK LAHENG | DESA SEMBORA | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PAK LAHENG | DESA BENUANG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| 7. | KECAMATAN SADANIANG | | | |
| | DESA PENTEK | DESA PENTEK | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA PENTEK | DESA AMAWANG | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | DESA PENTEK | DESA ANSIAP | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | DESA PENTEK | DESA BUNBUN | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | DESA PENTEK | DESA SEKABUK | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| | DESA PENTEK | DESA SUAK BARANGAN | ORANG/PP | Rp 100.000 |
| 8. | KECAMATAN SEGEDONG | | | |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA PARIT BUGIS | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA PENITI DALAM I | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA PENITI DALAM II | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA SUNGAI BURUNG | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA SUNGAI PURUN BESAR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA PARIT BUGIS | DESA PENITI BESAR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| 9. | KECAMATAN JONGKAT | | | |
| | DESA JUNGKAT | DESA JUNGKAT | ORANG/PP | Rp - |
| | DESA JUNGKAT | DESA SUNGAI NIPAH | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA JUNGKAT | DESA PENITI LUAR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA JUNGKAT | DESA WAJOK HILIR | ORANG/PP | Rp 50.000 |
| | DESA JUNGKAT | DESA WAJOK HULU | | |

BUPATI MEMPAWAH
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ...4.../2021.
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN ...2021... NOMOR ...2...

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

1. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

| Jenis Perjalanan Dinas Jabatan | Uang Harian | Biaya Penginapan | Biaya Transport | Jumlah Hari yang Dibayarkan | Biaya Pemetaan dan angkutan jenazah |
|---|-------------|------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| a. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dalam rangka koordinasi dan konsultasi | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | - |
| b. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| c. Perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengumandahan (datasering) | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| d. Perjalanan dinas jabatan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan / seleksi pendidikan dan sejenisnya | √ | √ | √ | Maksimal 2 (dua) hari | - |
| e. Perjalanan dinas jabatan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera waktu/ karena melaksanakan tugas | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| f. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti test pendidikan setara diploma/S1/S2/S3. | √ | √ | √ | Maksimal 2 (dua) hari | - |
| g. Perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/sosialisasi/advokasi/desiminasi dan sejenisnya | √ | √ | √ | Sesuai penugasan | - |
| h. Perjalanan dinas jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |
| i. Perjalanan dinas jabatan untuk menjemput/ mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. | √ | √ | √ | Maksimal 3 (tiga) hari | √ |

Keterangan :

1. √₁) : Rincian biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya berdasarkan lampiran tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. √₂) : Biaya penginapan diberikan pada saat kedatangan dan selama masa pengumandahan (datasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.
3. √₃) : Biaya transport diberikan untuk transport pada saat kedatangan dan kepulangan.
4. √₄) : Uang harian diberikan berupa uang saku, transport setempat dan uang makan sesuai standar selama mengikuti kegiatan.
5. √₅) : Biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan
6. Jenis perjalanan dinas jabatan pada **huruf h dan huruf i** : uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan diberikan paling banyak untuk 4 (empat) orang.

2. Contoh Rincian Biaya Perjalanan Dinas

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

| No. | Rincian Biaya | Jumlah | Keterangan |
|-----|----------------------------------|--------|------------|
| 1. | Uang Harian hari x Rp..... | | |
| 2. | Transport dari Mempawah ke | | |
| 3. | Transport dari ke | | |
| 4. | Penginapan | | |
| 5. | Uang Representasi | | |
| | Jumlah | | |
| | Terbilang | | |

| | |
|---|---|
| Telah dibayar sejumlah Rp. Bendahara Pengeluaran |, tanggal, bulan, tahun Telah menerima jumlah uang sebesar Rp. Yang menerima |
| (.....) NIP. | (.....) NIP. |

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
 Yang telah dibayar semula : Rp.
 Sisa kurang / lebih : Rp.

Mengetahui/Menyetujui :
 Kepala Satuan Kerja,
 Ttd/cap
 Nama Jelas / NIP

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-1-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021... NOMOR ..2.....

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

(Lambang Daerah)
 KOP NASKAH DINAS SKPD

DAFTAR TAMBAHAN BIAYA RIIL PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor Tanggal dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa biaya transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

| NO. | URAIAN | JUMLAH |
|--------------------|--|--------|
| 1. | Biaya Transportasi dari ke | Rp. |
| 2. | | |
| 3. | | |
| dstnya | | |
| Jumlah Pengeluaran | | Rp. |

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui :
 Pengguna Anggaran / Kuasa
 Pengguna Anggaran

Mempawah, 20xx

Pelaksana Perjalanan Dinas

Nama lengkap
 NIP.

Nama lengkap
 NIP.

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 4-1-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021 NOMOR 2

BUPATI MEMPAWAH
 MELINA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN
 DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

| NO | URAIAN | SATUAN | HARGA |
|-----|---|------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Biaya <i>Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)</i> | Orang/Kali | Rp. 900.000,- |
| 2. | Biaya <i>Rapid Test/ Swap Test Covid-19</i> | Orang/Kali | Rp. 300.000,- |

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal ~~4-1-2021~~
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021..... NOMOR 2.....

BUPATI MEMPAWAH
 DEWI INA